

# **STRATEGI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEUANGAN INKLUSIF BAGI SEKTOR MIKRO MELALUI PENDEKATAN ANP (ANALYTIC NETWORK PROCESS)**

Aisha Putrina Sari  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia  
Sentul City Bogor  
+6287882511015  
[putrina.aisha@gmail.com](mailto:putrina.aisha@gmail.com)

Andi Irawan  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia  
Sentul City Bogor  
+628563629196  
[guladua@gmail.com](mailto:guladua@gmail.com)

Bazari Azhar  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia  
Sentul City Bogor  
+6285781194909  
[bazari91@gmail.com](mailto:bazari91@gmail.com)

## ***Abstract***

*Only about 19% of Indonesian people can access proper financial services based on World Bank data in 2011. This is due to financial service is still exclusive not inclusive. Whereas, proper access to financial services is one of the factors that can improve society lives and further increase economic growth. Financial inclusion can be achieved by increasing the role of the banking, sharia banking in this case, so that they can be more active in providing financial services to the general public through micro sector. Using ANP (Analytic Network Process), this study found that there are five priority problems and strategies related to micro sector financing. According to experts and practitioners, the problem priorities are 1) Difficult Access; 2) Long Administration Process; 3) Low Quality of Human Resources; 4) Collateral and 5) Long disbursement of funds and according to experts and practitioners the five strategic priorities are: 1) Innovative financial products; 2) Improvement of market access; 3) Linkage; 4) Preparation of Human Resources and 5) Expand branches.*

**Keywords:** *Financial Inclusion, Sharia Banking, Micro Sector*

## **1. Pendahuluan**

*Financial inclusion*, atau keuangan inklusif, saat ini menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan di dunia saat ini. Keuangan inklusif yaitu sebuah isu untuk mengupayakan bagaimana agar masyarakat dalam sebuah negara mempunyai akses yang luas terhadap keuangan. Isu keuangan inklusif ini merupakan koreksi dari *financial exclusion* (keuangan eksklusif) yang terlebih dahulu ada dimana teori kapitalis dengan teori rembesannya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga hanya segelintir orang saja yang menikmati kekayaan akibat dari akses keuangan yang mereka miliki.

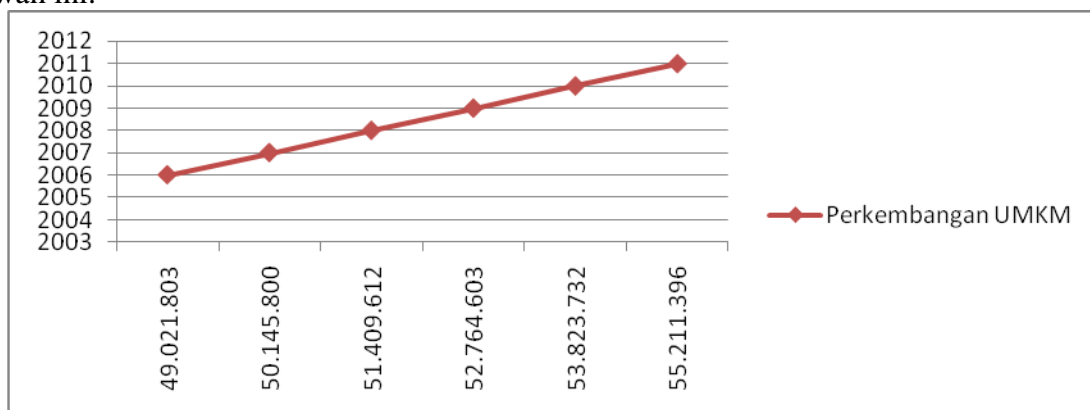
Indikator dari keuangan eksklusif sendiri, menurut penelitian yang dilakukan oleh Goodwin dkk (1999:41) terdiri dari rendahnya kemampuan rumah tangga untuk membayar utang, terputusnya hubungan rumah tangga dengan minimal satu kebutuhan utama mereka, keterpaksaan rumah tangga untuk meminjam uang selain kepada perbankan, kepemilikan akun perbankan dan asuransi, serta kepemilikan tabungan secara reguler. Untuk mengatasi masalah tersebut, keuangan inklusif diyakini menjadi sebuah solusi, apalagi keuangan

inklusif juga dipercaya memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan suatu negara. Hal ini sesuai dengan hasil KTT G-20 di Meksiko pada bulan Juni tahun 2012 lalu, bahwa keuangan inklusif sangat penting dalam membangun ketahanan pertumbuhan ekonomi dan menjaga perekonomian global dari hantaman krisis.

Berbicara tentang keuangan inklusif tidak akan lepas dari pembahasan mengenai perbankan karena perbankan sendiri, selain menguasai lebih dari 80% industri keuangan, juga menjadi salah satu instrumen yang tepat sebagai pendistributor pendapatan di antara golongan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan yang tidak. Oleh karena itu, fungsi lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keuangan inklusif.

Menurut data yang diperoleh dari World Bank, pada tahun 2011 akses masyarakat dunia (manusia dewasa dengan usia lima belas tahun ke atas) terhadap keuangan masih sebesar 50%. Artinya, dari enam milyar populasi, masih ada tiga milyar penduduk di dunia yang belum tersentuh akses keuangan perbankan. Bahkan, masih menurut World Bank, dua pertiga rakyat miskin di dunia juga tidak mempunyai akses keuangan. Penyebabnya bukan saja karena kemiskinan, tetapi jarak menuju institusi keuangan yang jauh, proses yang rumit, dan biaya menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan akses terhadap keuangan. Padahal akses keuangan ini menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan. Dengan adanya akses keuangan yang bagus, masyarakat akan mempunyai peluang-peluang yang besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada tahun 2011 di Indonesia, masyarakat dewasa dengan usia lima belas tahun ke atas, hanya sekitar 19,6% saja yang sudah mendapat akses keuangan di perbankan. Padahal jika masyarakat miskin di Indonesia mempunyai akses keuangan berupa akun di perbankan, program-program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat berjalan lebih efektif dan risiko korupsi bisa diminimalisasi. Rakyat miskin juga akan dapat meminta pembiayaan-pembiayaan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri, dengan adanya akses terhadap perbankan mereka dapat menambah modal usaha mereka. Apalagi di Indonesia sektor UMKM merupakan sektor yang tiap tahun bertambah pelaku usahanya, seperti pada grafik di bawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Perkembangan UMKM Indonesia**  
 Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2013

Belum lama ini pula, dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Asia Pacific Economic Cooperation* (KTT APEC) yang diselenggarakan di Bali 1-8 oktober 2013, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Asia Pasifik. Oleh karena itu beliau mengajak anggota APEC untuk memfasilitasi peran serta usaha mikro kecil menengah, pemuda dan wirausaha perempuan. Presiden SBY secara nyata

mengakui bahwa UMKM adalah *core*, inti, yang perlu diberi perhatian dan perlakuan khusus karena dampak positifnya yang begitu besar sehingga diibaratkan sebagai tulang punggung. UMKM telah terbukti secara nyata membuka lapangan pekerjaan bagi banyak sekali penduduk di Asia Pasifik serta *resilient* terhadap guncangan ekonomi.

Sayangnya, di Indonesia sendiri akses UMKM terhadap perbankan masih rendah. Pada saat Orde Baru juga, meski kredit UKM telah menjadi agenda pemerintahan masa itu tetapi kesejahteraan rakyat melalui peningkatan dunia usaha kecil tersebut tidak berhasil. Menurut Darmin Nasution, pada tahun 2010, sebanyak 60-70% UMKM belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal, hampir 53 juta masyarakat miskin bekerja di sektor tersebut. Senada dengan hal itu, ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Yogyakarta juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, akses perbankan terhadap UMKM masih sulit, yang di sisi lain, masalah modal masih menjadi kendala yang sulit terpecahkan bagi pelaku UMKM yang sedang tumbuh. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa 90% dari UMKM ini adalah sektor mikro. Artinya bahwa kebijakan untuk pengembangan UMKM seharusnya difokuskan ke sektor mikro.

Menurut Todaro (2006:286), adanya akses keuangan yang baik, dalam hal ini berupa pinjaman, para pedagang kaki lima yang miskin dan melakukan usahanya di daerah perkotaan mendapatkan peluang untuk menumpuk persediaan yang banyak sehingga barang yang diinginkan oleh pembeli tersedia dan pedagang kaki lima tersebut dapat bermetamorfosis menjadi pedagang besar pada akhirnya. Tidak hanya itu saja, masih menurut Todaro (2006:286), dengan akses pinjaman yang besar bagi rakyat kecil, petani pun juga dapat diuntungkan karena memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mendiversifikasi tanaman pertaniannya serta dapat mengembangkan ladangnya menjadi pertanian komersial sehingga bisa menjadi petani yang lebih besar.

Melihat pentingnya peranan perbankan dalam mendukung keuangan inklusif, maka penulis tertarik untuk mengetahui strategi apa yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah untuk mendukung program ini yang pada akhirnya secara tidak langsung akan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di sektor mikro. Penelitian ini perlu dilakukan karena kebijakan keuangan inklusif hadir akibat transmisi moneter yang tidak bisa menjadi tangga antara rakyat miskin dan sektor keuangan. Hal ini tidak lain disebabkan karena transmisi moneter yang ada masih menggunakan instrumen bunga. Akibatnya, meski kini mulai banyak perbankan konvensional yang melirik usaha mikro untuk diberikan kredit, tetapi selama ada bunga dalam perekonomian keuangan kita, maka selama itu pula akan terjadi kesenjangan antara sektor riil, yang dalam hal ini di proxi dengan rakyat miskin, dengan sektor keuangan. Karena itulah, strategi perbankan syariah untuk mendukung program ini menjadi sangat penting terutama dalam hal pembiayaan sektor mikro. Apalagi, seperti yang dikemukakan oleh Asyraf (2007:24), adanya nilai yang mengatur perbankan syariah pada keseluruhan operasi dan *outlook*, membuat perbankan syariah menurut Mohiledin dkk (2011:2) mempunyai tekanan yang besar terhadap keadilan sosial, inklusif, dan pembagian sumberdaya bagi golongan yang memiliki dan yang tidak memiliki karena itu merupakan prinsip-prinsip utama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan terhadap sektor mikro.
2. Mengetahui strategi perbankan syariah dalam mendukung program keuangan inklusif bagi sektor mikro sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar di sektor tersebut.

Diharapkan dengan terealisasinya tujuan penelitian di atas dapat menjadi sebuah kajian mengenai permasalahan apa saja yang menjadi penghambat maksimalnya pembiayaan terhadap sektor mikro serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah.

## 2. Metodologi

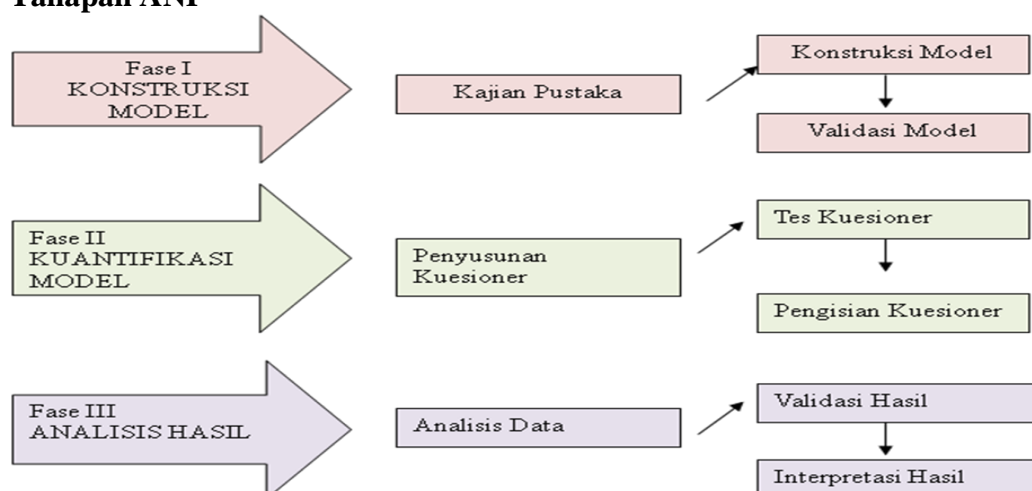
### 2.1. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perbankan dalam mendukung program keuangan inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini akan mencari tahu pendapat para praktisi dan praktisi di bidang keuangan mikro dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan saat pengolahan data melalui *Super Decision* untuk mengetahui skala prioritas dari hasil pendekatan kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya.

#### 2.1.1. Gambaran Umum Metode ANP

*Analytic Network Process* atau ANP menurut Ascarya (2005:2) adalah pendekatan baru metode kualitatif, bersifat non parametrik dan non bayesian, untuk suatu proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan dengan tidak membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. ANP merupakan satu dari metode *multiple criteria decision making* (MCDM) yang dikembangkan dan merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang merupakan perkembangan lanjutan dari metode terdahulu yakni *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

#### 2.1.2. Tahapan ANP



**Gambar 2.1 Tahapan ANP**

Seperti yang telah diperlihatkan pada gambar di atas, ada tiga tahapan dalam ANP, yaitu:

#### 1. Kontruksi Model ANP

Pada tahap ini dilakukan konstruksi permasalahan yang akan dikaji. Secara teoritis, konstruksi model ANP bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan kajian pustaka, kajian pustaka dan wawancara pakar, serta dengan cara *Forum Group Discussion* (FGD). Pada penelitian ini, konstruksi permasalahan dilakukan dengan melalui kajian pustaka. Selanjutnya dibuat kerangka permasalahan dalam kerangka ANP dan diverifikasi kepada pakar yang memahami permasalahan yang akan dikaji.

## 2. Kuantifikasi Model

Setelah model ANP disetujui, dilakukan penyusunan kuesioner ANP. Kuesioner dibuat sesuai dengan kerangka ANP dengan skala numerik. Selanjutnya kuesioner diberikan kepada para responden. Pada penelitian ini responden terdiri dari praktisi perbankan syariah dan pakar keuangan mikro.

## 3. Analisis Hasil

Setelah kuesioner diisi oleh para pakar dan praktisi lalu data yang telah diterima diolah melalui *software super decision* untuk dicari nilai *rater agreement* dan *geometric mean*. *Rater agreement* adalah tingkat kesesuaian para responden terhadap suatu masalah sedangkan *geometric mean* digunakan untuk mengetahui prioritas dari kelompok responden mengenai permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian.

### 2.2. Variabel dan Definisi Operasional

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka didapatkan variabel-variabel yang kemudian dijadikan sebagai tahap awal dalam dekomposisi permasalahan untuk kemudian diteruskan pada proses pengisian kuesioner. Pada proses dekomposisi, dilakukan pembagian *cluster* menjadi dua yaitu *cluster* masalah dan strategi dengan masing-masing *cluster* terbagi menjadi tiga *node* baik permasalahan maupun solusi sesuai kategori *cluster*.

### 2.3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber dan jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer didapat dari kuesioner kepada para pakar dan praktisi. Dalam penyusunan kerangka ANP, perlu adanya data maupun informasi preferensi yang diwakili oleh para praktisi Perbankan Syariah serta pakar keuangan mikro tentang permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari literatur-literatur dan selanjutnya dibentuk menjadi kerangka ANP dan kuesioner. Pakar yang diambil pada penelitian ini adalah pakar-pakar yang menguasai keuangan mikro karena aktivitas mereka di dunia lembaga keuangan mikro sedangkan praktisi yang diambil adalah para praktisi perbankan syariah yang berada di bagian pembiayaan mikro. Penyebaran kuisisioner ini diperlukan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan skala ratio. Pengumpulan data dilakukan secara terpisah untuk masing-masing responden. Berikut daftar responden dari kuesioner ANP :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Responden Pakar dan Praktisi**

Pakar		Praktisi	
Nama	Instansi	Nama	Instansi
Pak Ali Sakti	Peneliti Bank Indonesia	Pak Bambang	Bank Rakyat Indonesia Syariah
Pak Alwin	Supervisor Pro Ibu	Pak Kharisma	Bank Rakyat Indonesia Syariah
Pak Aslichan	Direktur Pusat Inkubasi Usaha Kecil	Pak Putra	Bank Syariah Mandiri
Pak Buchori	Direktur Koperasi Pesantren Syariah	Pak Roni	Bank Syariah Mega Indonesia
Pak Dedy	Manajer Koperasi Pesantren Syariah	Pak Saifullah	Bank Syariah Mandiri
Pak Haris	Direktur BTTM	Pak Sukadi	Bank Syariah Mega Indonesia
Pak Sholeh	Manajer Microfin	Pak Wisnu	Bank Syariah Mandiri

Data sekunder didapat dari website-website resmi seperti *World Bank*, Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia untuk mendukung analisis permasalahan yang diteliti.

#### 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode ANP, ada beberapa tahap yang bisa dipilih dalam merumuskan kerangka ANP dan dalam penelitian ini, proses perumusan dilakukan dengan tinjauan literature baik literature nasional maupun internasional yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Setiap permasalahan maupun strategi di data dan diklasifikasikan dengan mencantumkan sumber literature yang digunakan agar data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu, kerangka tersebut diajukan kepada pakar di bidang tersebut untuk di fiksasi. Tahap selanjutnya setelah kerangka ANP disusun dan disetujui adalah dengan merancang kuisisioner sesuai dengan kerangka tersebut. Kuisisioner tersebut lalu disebarakan kepada para pakar dan praktisi yang benar-benar menguasai masalah tersebut. Penyebaran kuisisioner ini diperlukan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan skala ratio. Dalam pengumpulan data ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing responden.

#### 2.5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah disusun dalam bentuk model kerangka ANP serta hasil data kuisisioner pun telah didapat, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Alat analisis ini adalah ANP dan diolah dengan menggunakan *software* “*Super Decision*”.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Dekomposisi

##### 3.1.1. Identifikasi Masalah

Dekomposisi masalah yang diangkat dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu serta kajian literatur nasional maupun internasional. Berdasarkan rujukan tersebut, permasalahan yang dialami oleh perbankan maupun usaha mikro dalam hal pembiayaan dibagi menjadi lima aspek *cluster* permasalahan, yaitu *cluster* proses pembiayaan, *cluster* manajemen mikro, *cluster* pembiayaan mikro, *cluster* keuangan usaha mikro serta *cluster* lain-lain di mana pada masing-masing *cluster* terdapat tiga rincian *node* permasalahan sesuai kategori *cluster* tersebut. Sebagai strategi perbankan syariah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, strategi berdasarkan tinjauan literatur dibagi menjadi tiga *cluster* strategi, yaitu *cluster* strategi teknis, *cluster* strategi fundamental dan *cluster* strategi eksternal di mana pada tiap *cluster* dibagi menjadi tiga *node* permasalahan sesuai kategori *cluster*.

##### 3.1.1.1 Permasalahan

###### a. Proses Pembiayaan

Masalah yang ada pada *cluster* proses pembiayaan adalah hal-hal yang terjadi saat usaha mikro meminta pembiayaan terhadap perbankan. Permasalahan dalam *cluster* proses pembiayaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Administrasi lama. Permasalahan ini disebabkan karena adanya peraturan yang ketat dalam proses pemberian pembiayaan sehingga diperlukan proses administrasi yang cukup lama oleh perbankan. Menurut Nurmanaf (2007:104) administrasi yang lama pada perbankan menyebabkan para pelaku usaha mikro harus menunggu lama sedangkan di lain pihak usaha mikro membutuhkan dana dengan cepat.

2. Faktor kecepatan pencairan dana. Menurut Maryatmo (2009:7) pelaku usaha mikro lebih menyukai untuk meminta pembiayaan dari rentenir atau lembaga informal dibandingkan perbankan karena dalam proses pencairan dana lembaga informal tersebut lebih cepat dibandingkan dengan proses pencairan dana pada perbankan.
3. Keluwesan penentuan jumlah dana yang dibutuhkan. Perbankan, menurut Maryatmo (2009:7), tidak luwes dalam menentukan dana yang akan diberikan kepada pelaku usaha mikro. Tidak seperti lembaga informal yang bisa menyediakan pembiayaan sesuai kebutuhan pelaku usaha mikro, perbankan telah memiliki standar tersendiri mengenai jumlah pembiayaan yang akan diberikan sehingga bersifat kaku dan kurang dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro.

**b. Manajemen Mikro**

Masalah yang ada pada *cluster* manajemen mikro adalah masalah yang terjadi dalam manajemen mikro yang menjadi salah satu penghambat dalam pemberian pembiayaan oleh perbankan. Permasalahan dalam *cluster* manajemen mikro dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Administrasi sederhana. Permasalahan ini terjadi pada usaha mikro yang berkaitan dengan proses pencatatan usaha tersebut. Kajian Usaha Mikro Indonesia (2006:14) menyatakan bahwa proses pencatatan yang dilakukan oleh manajemen usaha mikro dianggap masih sederhana sehingga dianggap tidak memenuhi standar. Padahal, perbankan memerlukan proses pencatatan yang sesuai standar agar mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi dari sektor mikro yang meminta pembiayaan tersebut.
2. Sumber daya manusia berkualitas rendah. Menurut Mayada (1997) usaha mikro masih dijalankan oleh sumber daya manusia yang belum memiliki kualitas baik. Hal ini menjadi salah satu hambatan karena perbankan dapat meragukan kinerja usaha mikro.
3. Penguasaan teknologi kurang. Menurut Kajian Usaha Mikro Indonesia (2006:5) usaha-usaha mikro di Indonesia masih belum menggunakan teknologi secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya proses manajemen maupun produksi usaha mikro.

**c. Pembiayaan Mikro**

Masalah yang ada pada *cluster* pembiayaan mikro adalah masalah yang terjadi saat pelaku usaha mikro berusaha untuk mendapatkan pembiayaan di perbankan. Pada *cluster* pembiayaan mikro permasalahan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Akses sulit. Menurut Rahim (2007:42) usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Hal ini bisa disebabkan salah satunya karena para pelaku usaha mikro berada di lokasi-lokasi yang tidak strategis atau jauh dari perbankan.
2. Kurangnya informasi kredit mikro. Menurut Mohiledin (2011:43) terbatasnya informasi mengenai pembiayaan-pembiayaan mikro membuat para pelaku usaha mikro memiliki pengetahuan yang kurang mengenai produk-produk pembiayaan.
3. Mahalnya pembiayaan. Permasalahan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2012:3) bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada usaha mikro dianggap mahal sehingga para pelaku usaha mikro belum sanggup untuk mendapatkannya.

**d. Keuangan Mikro**

Masalah yang ada pada *cluster* keuangan mikro adalah masalah yang terjadi pada sektor mikro yang berkaitan dengan kondisi usaha dan keuangan. Pada *cluster* keuangan mikro permasalahan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Persyaratan jaminan. Salah satu syarat bagi usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan adalah dengan memberikan jaminan kepada pihak perbankan. Menurut Angela (2012:541) persyaratan jaminan ini memberatkan bagi pelaku usaha mikro.
2. Usaha tidak stabil. Perbankan memiliki anggapan bahwa usaha mikro rentan akan kebangkrutan atau tidak memiliki prospek pembiayaan yang bagus. Menurut Mayada (1997: 2) usaha tidak stabil ini ditakutkan akan menyulitkan proses pembiayaan di masa depan.
3. Margin tipis. Menurut Kajian Usaha Mikro Indonesia (2006:5) usaha mikro yang ada masih memiliki tingkat margin yang tipis sehingga dianggap kurang memiliki prospek pembiayaan yang baik di masa depan.

**e. Lain-lain**

Masalah yang ada pada *cluster* lain-lain adalah masalah yang tidak menjadi permasalahan dalam satu kategori tertentu. Pada *cluster* lain-lain, permasalahan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan yang belum memadai. Menurut Mayada (1997:30) kurangnya SDM ini menjadi salah satu penghambat perbankan dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro.
2. Infrastruktur pembiayaan kurang bagus. Saat ini, infrastruktur pembiayaan yang ada masih belum bagus padahal menurut Mohiledin (2011:43) adanya infrastruktur keuangan yang bagus diharapkan bisa meningkatkan cakupan pembiayaan.
3. Pendekatan perbankan sulit. Menurut Mayada (1997:3) pendekatan perbankan kepada pelaku mikro sulit karena adanya *Socio Economy* dan *Culture Barriers* sedangkan pihak perbankan memiliki pengetahuan yang kurang terhadap permasalahan kultur dan sosial.

**3.1.1.2 Strategi**

**a. Strategi teknis**

Strategi teknis adalah strategi berupa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam waktu jangka pendek. Strategi dibagi menjadi tiga pada *cluster* strategi teknis, yaitu:

1. Memperbanyak cabang. Menurut Anjum (2012:280), banyaknya cabang perbankan akan meningkatkan akses yang luas kepada pelaku usaha mikro.
2. Persiapan SDM, menurut Mayada (1997:3), yaitu SDM-SDM yang paham akan sektor mikro. Hal ini untuk memudahkan pelaku perbankan dalam mendekati sektor mikro.
3. *Financial products* yang lebih inovatif. Adanya *financial products* yang lebih inovatif menurut Mayada (1997:15) akan membuat kebutuhan pembiayaan dari sektor mikro lebih terakomodasi.

**b. Strategi Fundamental**

Strategi fundamental adalah strategi mendasar yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam mendukung pembiayaan terhadap sektor mikro. Strategi dibagi menjadi tiga pada *cluster* strategi fundamental, yaitu:

1. Komitmen. Menurut Mayada (1997:12) komitmen perbankan dalam membantu sektor mikro dianggap penting. Jika perbankan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pembiayaan terhadap sektor mikro maka perbankan akan mencari dan menjalankan strategi-strategi yang tepat untuk mendukung pembiayaan.



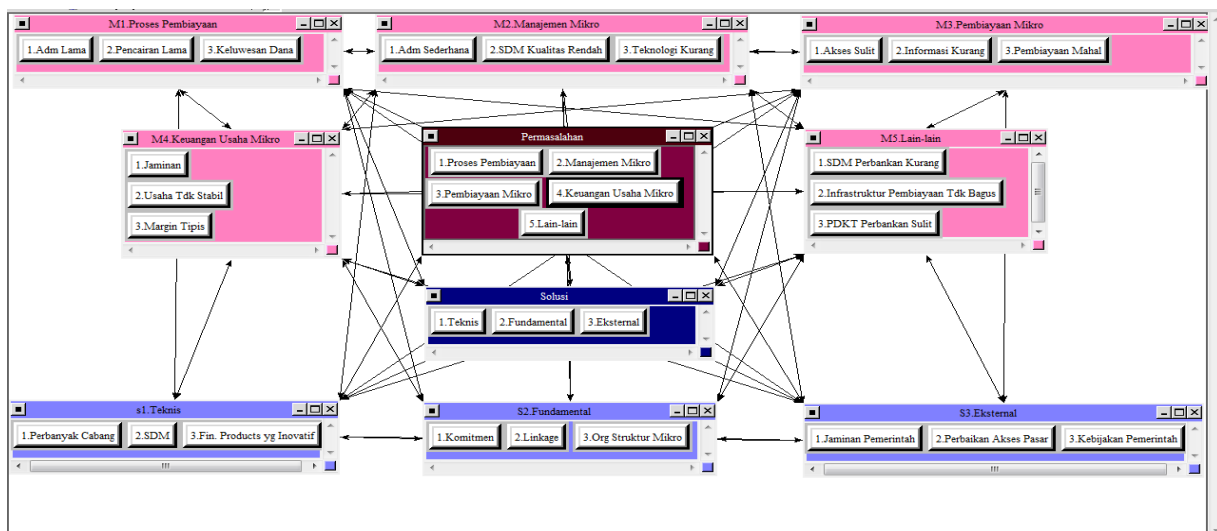
2. *Linkage*. Menurut Srinjani (2012:57) adanya *linkage* dianggap dapat mengakselerasi akses usaha mikro terhadap pembiayaan. *Linkage* ini dapat dilakukan dengan lembaga mikro atau komunitas lokal.
3. Organisasi struktur mikro. Menurut Mayada (1997:4) adanya struktur usaha mikro yang independen di perbankan dapat mengakomodasi kebutuhan usaha mikro karena memiliki kekuasaan penuh dalam perbankan.

**c. Strategi Eksternal**

Strategi eksternal adalah strategi yang didapat dari andil pemerintah. Strategi dibagi menjadi tiga pada strategi eksternal, yaitu:

1. Jaminan pemerintah, yaitu berupa bantuan jaminan kepada perbankan. Menurut Kristianto (2006:87) bantuan jaminan dari pemerintah diperlukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh perbankan.
2. Perbaikan akses pasar, menurut *The Consultative Group to Assist the Poor* (2004:2). Adanya akses pasar yang baik dapat meningkatkan pembiayaan perbankan terhadap sektor mikro.
3. Kebijakan pemerintah. Menurut Mayada (1997:20) dan Kristianto (2006:87) kebijakan pemerintah seperti peraturan atau undang-undang perbankan diperlukan agar perbankan dapat optimal dalam membantu sektor mikro.

**3.1.2. Jaringan ANP**



**Gambar 3.1 Jaringan ANP**

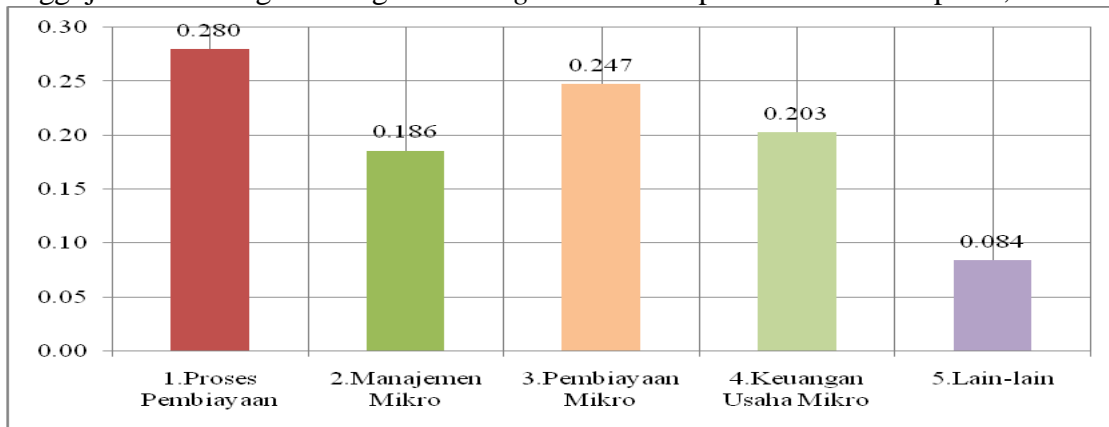
Jaringan ANP adalah hasil dari konstruksi model. Gambar di atas menunjukkan jaringan ANP yang digunakan untuk analisis hasil kuesioner pada *software Super Decisions*.

**3.2. Sintesis dan Analisis**

Subbab ini akan menjelaskan tentang hasil secara keseluruhan tentang kecenderungan responden mengenai permasalahan dan strategi dari pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor mikro yang ditunjukkan oleh nilai *geometric mean*. Tingkat kesepakatan atau *rater agreement* antar responden mengenai permasalahan dan strategi akan ditunjukkan oleh nilai *Kendall's coefficient of concordance (W)*.

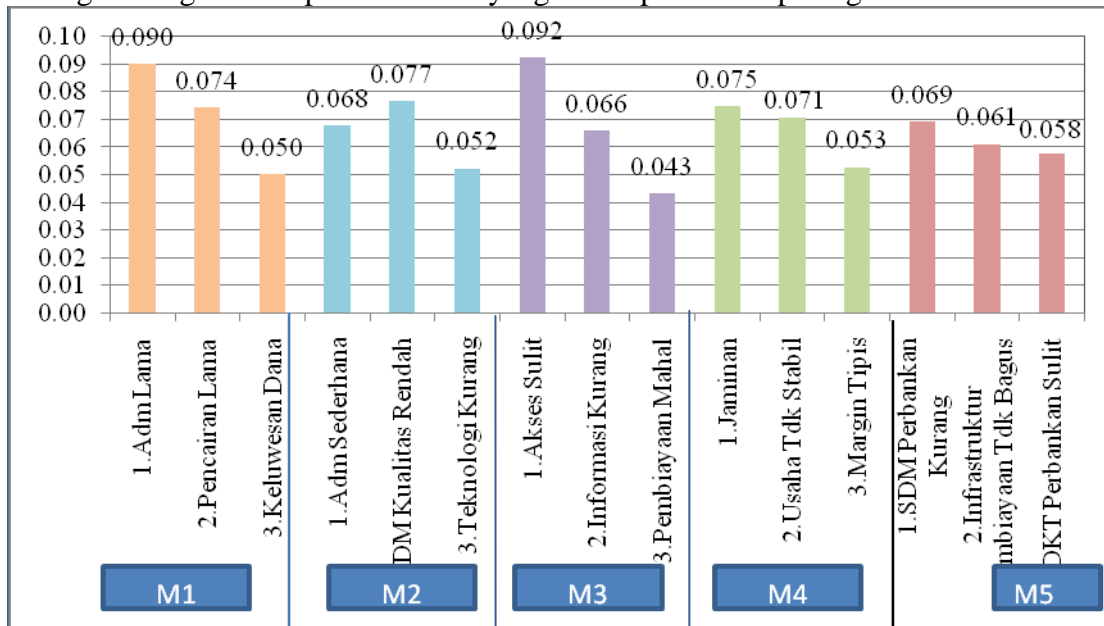
### 3.2.1. Hasil Keseluruhan Geometric mean

*Rater agreement* keseluruhan responden pada permasalahan tergolong tinggi yaitu sebesar  $W=0,465$  dengan nilai *rater agreement* pada pakar sebesar  $W_{pk}=0,65$  yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *rater agreement* dari praktisi sebesar  $W_{pr}= 0,373$ .



Gambar 3.2 Prioritas Permasalahan

Hasil keseluruhan dari seluruh responden yang dilihat dari nilai *geometric mean* (gambar 3.2) menunjukkan bahwa prioritas permasalahan dalam pembiayaan mikro yaitu pada urutan pertama terletak pada proses pembiayaan, urutan kedua terletak pada pembiayaan usaha mikro dan urutan ketiga terletak pada keuangan usaha mikro. Lebih rinci, prioritas dari masing-masing elemen permasalahan yang ada dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



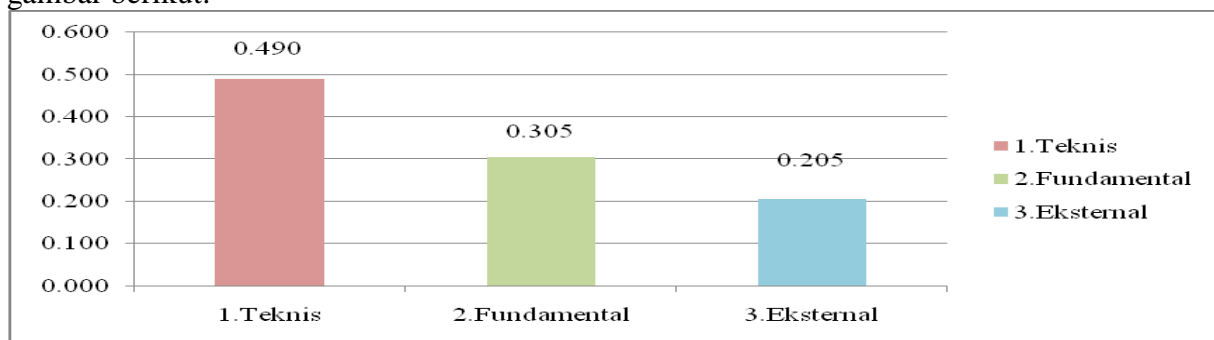
Gambar 3.3 Prioritas Elemen Permasalahan

- Ket:
- M1 : Proses Pembiayaan
  - M2 : Manajemen Mikro
  - M3 : Pembiayaan Mikro
  - M4 : Keuangan Usaha Mikro
  - M5 : Lain-lain

Gambar 3.3 menunjukkan prioritas elemen permasalahan dari pihak pakar dan praktisi. Pada aspek permasalahan proses pembiayaan, urutan prioritas terletak pada 1) administrasi lama; 2) pencairan lama; dan 3) keluwesan dana. Urutan prioritas pada aspek permasalahan manajemen mikro yaitu terdiri dari 1) SDM kualitas rendah; 2) administrasi

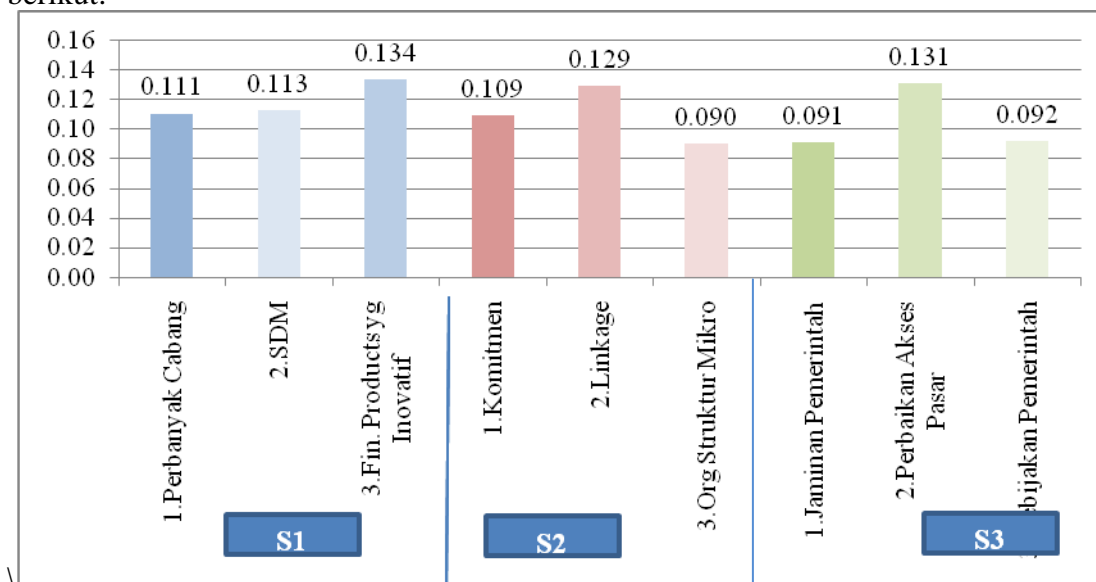
sederhana dan 3) teknologi kurang. Urutan prioritas pada aspek permasalahan pembiayaan mikro yaitu terdiri dari 1) akses sulit; 2) informasi kurang dan 3) pembiayaan mahal. Urutan prioritas pada aspek permasalahan keuangan mikro yaitu terdiri dari 1) jaminan; 2) usaha tidak stabil dan 3) margin tipis. Urutan prioritas pada aspek lain-lain yaitu terdiri dari 1) SDM perbankan kurang; 2) infrastruktur pembiayaan tidak bagus dan 3) pendekatan bank sulit.

Jika pada aspek permasalahan kesepakatan antar responden baik pakar maupun praktisi tinggi, maka kondisi tersebut tidak berlaku pada aspek strategi. *Rater agreement* aspek strategi tinggi bagi pakar dengan  $WP_k=0,265$  tetapi rendah bagi praktisi dengan  $WPr=0,020$  yang menunjukkan bahwa pada praktisi terjadi keragaman jawaban mengenai strategi yang tepat. Strategi yang beragam menurut praktisi ini juga turut mempengaruhi *rater agreement* total yaitu  $W=0,097$ . Urutan prioritas strategi secara keseluruhan ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3.4 Prioritas Strategi

Gambar di atas menunjukkan bahwa prioritas pertama dari aspek strategi menurut pakar dan praktisi yaitu strategi teknis yang lalu diikuti oleh strategi fundamental dan strategi eksternal. Rincian prioritas dari masing-masing elemen strategi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.5 Prioritas Elemen Strategi

Ket: S1 : Strategi Teknis  
 S2 : Strategi Fundamental  
 S3 : Strategi Eksternal

Prioritas dari strategi teknis adalah 1) *financial products* yang inovatif; 2) SDM dan 3) perbanyak cabang. Pada strategi fundamental, urutan prioritas adalah 1) *linkage*; 2) komitmen

dan 3) organisasi struktur mikro. Terakhir, yaitu strategi eksternal menunjukkan bahwa prioritas ada pada 1) perbaikan akses pasar; 2) kebijakan pemerintah dan 3) jaminan pemerintah.

*Rater agreement* yang tinggi pada aspek permasalahan dari sudut pandang pakar dibandingkan praktisi menunjukkan bahwa kesepakatan pendapat pakar lebih besar dibandingkan dengan pendapat praktisi yang memiliki jawaban beragam. Begitu juga dengan aspek strategi, *rater agreement* pakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan praktisi menunjukkan bahwa kesepakatan tinggi terjadi pada pihak pakar tetapi pada pihak praktisi jawaban yang diberikan masih beragam.

Secara keseluruhan, *rater agreement* pada aspek permasalahan *relatif* tinggi tetapi pada aspek strategi *rater agreement* rendah. Hal ini menunjukkan, pada aspek permasalahan baik pakar maupun praktisi mempunyai kesepakatan yang tinggi tetapi untuk aspek strategi belum ditemukan kesepakatan tinggi karena jawaban yang diberikan kedua belah pihak masih beragam.

### 3.2.2. Analisis Hasil

Akses keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terkecuali di Indonesia. Tetapi, pada tahun 2011 hanya sekitar 19,6% masyarakat Indonesia yang telah memiliki akses keuangan di perbankan. Padahal hal ini menjadi peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana. Terlebih ketika pembicaraan diarahkan kepada isu keuangan inklusif, peranan perbankan menjadi sangat penting untuk mengakselerasi akses keuangan terhadap masyarakat luas, seperti yang diutarakan oleh *Institute of Banking and Finance* bahwa keuangan inklusif adalah pelayanan perbankan dalam biaya yang terjangkau.

Sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perbankan yang menguasai sektor keuangan hingga 80% adalah dengan meningkatkan pembiayaan terhadap sektor mikro dimana mayoritas masyarakat Indonesia menjadi pelaku usaha di sektor tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan ANP kepada para praktisi dan pakar usaha mikro, didapatkan prioritas strategi dari setiap elemen strategi keseluruhan, yaitu 1) *Financial products* yang inovatif; 2) perbaikan akses pasar dan 3) *Linkage*. Ketiga prioritas keseluruhan ini menjadi prioritas pertama pada masing-masing *cluster* strategi yaitu strategi teknis, eksternal, dan fundamental. Dari hasil tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam rangka meningkatkan pembiayaan terhadap sektor mikro untuk mendukung keuangan inklusif memang diperlukan sinergi dari semua pihak yaitu perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah lainnya dan pemerintah.

*Financial products* yang inovatif menurut Mayada (1997:15) akan membuat kebutuhan pembiayaan dari sektor mikro lebih terakomodasi. Memang harus diakui bahwa saat ini salah satu tantangan perbankan syariah adalah dari segi pengembangan produk. Menurut Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 (2013:33) jumlah produk perbankan syariah hanya berjumlah 16 sedangkan bank konvensional memiliki produk sejumlah 27 padahal secara global produk perbankan syariah cukup banyak seperti Malaysia yang memiliki sekitar 46 produk perbankan syariah. Adanya produk perbankan syariah yang bisa mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha mikro tentu akan membuat rantai penyaluran pembiayaan menjadi lebih singkat sehingga tidak memerlukan biaya tambahan yang nantinya akan membuat pembiayaan menjadi semakin mahal.

Prioritas kedua, yaitu perbaikan akses pasar. hal ini seperti yang diutarakan oleh *The Consultative Group to Assist the Poor* (2004:2) bahwa dengan adanya akses pasar yang baik dapat meningkatkan pembiayaan perbankan terhadap sektor mikro. Perbaikan akses pasar salah satunya bisa dilakukan dengan perbaikan infrastruktur yang lebih baik seperti misalnya jalan raya ataupun transportasi. Bentuk Negara Indonesia yang kepulauan dan terdiri dari

ribuan pulau memang memerlukan infratraktur yang baik agar para pelaku usaha bisa mendapatkan akses keuangan yang layak.

Prioritas ketiga, yaitu *linkage program*. *Linkage program* ini dapat dilakukan dengan lembaga mikro atau komunitas lokal dan menurut Srinjani (2012:57) adanya *linkage* dianggap dapat mengakselerasi akses usaha mikro terhadap pembiayaan. Perbankan syariah memang telah melakukan *linkage program* dengan BPRS atau lembaga keuangan lainnya. *Linkage* sendiri memang bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu *channeling*, *executing*, dan *joint financing*. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya *linkage* tentu saja pembiayaan menjadi lebih mahal karena pelaku usaha mikro tidak mendapatkan dana langsung dari pemilik dana. Perlu dilakukan kajian mengenai *linkage* yang tidak menimbulkan biaya mahal sehingga pelaku usaha mikro dapat menerima pembiayaan dengan tepat cepat dan murah.

Prioritas keempat, yaitu persiapan SDM memang perlu dilakukan karena saat ini memang SDM perbankan syariah secara keseluruhan masih belum tercukupi sehingga cukup banyak kasus bajak membajak SDM antar perbankan syariah. Kebutuhan SDM perbankan syariah pertahunnya mencapai 11000 tenaga kerja sedangkan pasar baru bisa menyediakan sekitar 3500 tenaga kerja. Padahal, perbankan syariah masih membutuhkan tenaga kerja yang memahami seluk beluk syariah secara mendalam yakni tidak hanya tenaga kerja yang paham pada tataran praktis tetapi juga pada tataran teoritis.

Prioritas kelima, yaitu perbanyak cabang. Perbanyak cabang menjadi prioritas kelima bisa disebabkan karena banyaknya modal yang harus dikeluarkan jika perbankan syariah secara massif mendirikan cabang-cabang baru. Perlu adanya pertimbangan yang matang dalam menjalankan strategi perbanyak cabang jika dilihat dari sudut pandang perbankan syariah. Apalagi untuk saat ini SDM masih belum mencukupi perbankan syariah yang telah ada.

Dapat disimpulkan bahwa saat ini, *financial products* yang inovatif memang menjadi strategi utama untuk dilakukan. Hal ini karena *financial products* yang inovatif. tidak membutuhkan biaya besar dan bisa dilakukan oleh masing-masing perbankan syariah secara internal. Hanya saja, perbankan syariah masih harus tetap berhati-hati dalam merancang produk agar tetap sesuai dengan syariat Islam dengan cara menjaga koordinasi yang baik dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 4. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam mendukung keuangan inklusif adalah dengan meningkatkan pembiayaan terhadap sektor mikro. Secara keseluruhan permasalahan yang menjadi prioritas menurut praktisi dan pakar adalah 1) proses pembiayaan; 2) pembiayaan mikro; 3) keuangan usaha mikro; 4) manajemen mikro dan 5) lain-lain dengan rater agreement praktisi dan pakar relatif tinggi terhadap permasalahan ( $W=0.465$ ) Secara rinci, lima prioritas permasalahan menurut para pakar dan praktisi adalah; 1) Akses Sulit; 2) Administrasi Lama; 3) SDM Kualitas Rendah; 4) Jaminan dan 5) Pencairan Lama.
2. Prioritas strategi secara keseluruhan menurut praktisi dan pakar adalah 1) strategi teknis; 2) strategi fundamental dan 3) strategi eksternal dengan rater agreement praktisi dan pakar terhadap strategi yang cukup rendah ( $W=0.097$ ). Secara rinci, lima prioritas strategi menurut praktisi dan pakar adalah; 1) *Financial products* yang inovatif; 2) Perbaikan akses pasar; 3) *Linkage*; 4) Persiapan SDM dan 5) Perbanyak cabang.

## 4.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pihak perbankan syariah dapat meningkatkan kerjasama dengan pakar pembiayaan mikro untuk mengakselerasi pembiayaan di sektor ini.
2. Selain dari tataran pelaku, dukungan pemerintah juga perlu dilakukan mengingat sektor ini merupakan sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia.
3. Masih banyak keterbatasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini oleh karena itu akan lebih baik jika dilakukan penelitian lanjutan dengan tambahan variable responden dan literature permasalahan maupun strategi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2008. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta : Khalifa Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. 2001. Jakarta : Gema Insani Press.
- Anjum, Bimal & Rajeshtiwari. 2012. *Role of Private Sector Banks for Financial Inclusion*. Zenith International Journal of Multidisciplinary Research. Vol 2 Issue 1 hal 270-280.
- Angela & Valentina. 2012. *The Access of SME to Banking Financing and Current Challenges, the Case of EU Countries*. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 14(2).
- Arthesa, Ade & Edia Handiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. 2006. Jakarta : Indeks.
- Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia
- Ascarya, Widodo & Ferry. 2012. *Analysis of Expensive Microfinancing n Conventional and Islamic Microfinance Institutions in Indonesia*. Call For Paper Universitas of Brawijaya.
- Ascarya. 2012. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan - Bank Indonesia
- Beck, Thorsten & Asli Demirguc-Kunt. 2006. *Small and Medium-size Entreprises: Access to Finance as a Growth Constraint*. Journal of Banking&Finance. Vol 30 hal 2931-2943
- Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. 2006. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2007. *Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives*. 2<sup>nd</sup> Islamic Conference
- Kang, Kyoungwha. *What is Financial Inclusion?*. 2010. Ebook, download from The University of Iowa
- Karim, Adiwarmam. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta : Rajawali Press

**Kasmi****5. Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Ta'ala dan Muhammad s.a.w. Rasul Tercinta;
2. Kedua orang tua penulis atas do'a yang tiada henti;
3. Bapak Dr. M. Syafi'i Antonio selaku ketua STEI Tazkia;
4. Bapak Ir Ascarya yang telah memperkenalkan dan membimbing dalam penulisan menggunakan metode ANP;
5. Para responden baik pakar maupun praktisi yang telah memberikan waktu untuk mengisi kuesioner;
6. Teman-teman di kampus STEI Tazkia.

**Daftar Pustaka**

Al Quranul Karim

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2008. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta : Khalifa Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. 2001. Jakarta : Gema Insani Press.

Anjum, Bimal & Rajeshtiwari. 2012. *Role of Private Sector Banks for Financial Inclusion*. Zenith International Journal of Multidisciplinary Research. Vol 2 Issue 1 hal 270-280.

Angela & Valentina. 2012. *The Access of SME to Banking Financing and Current Challenges, the Case of EU Countries*. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 14(2).

Arthesa, Ade & Edia Handiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. 2006. Jakarta : Indeks.

Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia

Ascarya, Widodo & Ferry. 2012. *Analysis of Expensive Microfinancing n Conventional and Islamic Microfinance Institutions in Indonesia*. Call For Paper Universitas of Brawijaya.

Ascarya. 2012. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan - Bank Indonesia

Beck, Thorsten & Asli Demirguc-Kunt. 2006. *Small and Medium-size Entreprises: Access to Finance as a Growth Constraint*. Journal of Banking&Finance. Vol 30 hal 2931-2943

Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. 2006. Jakarta : PT Bumi Aksara

Dusuki, Asyraf Wajdi. 2007. *Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives*. 2<sup>nd</sup> Islamic Conference

Kang, Kyoungwha. *What is Financial Inclusion?*. 2010. Ebook, download from The University of Iowa

Karim, Adiwirman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta : Rajawali Press

Kasmir, S.E. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2010. Jakarta : Rajawali Press

Keterangan Pers Hasil KTT G-20 Los Cabos, Meksiko 18-19 Juni 2012. Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Khan, Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. 1994. Islamabad :Islamic Research Institute Press

- Kristianto, Djoko. *Peranan Perbankan Syariah dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multi Dimensi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 6, No 1 April 2006 halaman 86-97
- Mannan, M Abdul. 1997. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa
- Marshall, J Neill. 2004. *Financial Institutions in Disadvantaged Areas : a Comparative Analysis of Policies Encouraging Financial Inclusion in Britain and the United States*. Environment and Planning A, Volume 36 hal 241-261
- Maryatmo, R & Nyoman Yuyun Sri Rahayu. 2009. *Hambatan Penyerapan Kredit Usaha Kecil Studi Kasus di Pasar Anyar I Singaraja Bali*. Jejak Vol 2 No 1 Maret 2009
- Mayada, dkk. 1997. *Commercial Banks in Microfinance: New Actors in the Microfinance World*. USAID.
- Mohiledin, Mahmoud dkk. 2011. *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in OIC Countries*. 8<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. 2003. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nurmanaf, A Rozany. 2007. *Lembaga Informal Pembiayaan Mikro lebih Dekat Dengan Petani*. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 5 No 2 Juni 2007
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2007. *Islamic Microfinance: a Missing Component in Islamic Banking*. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007, pp. 38-53
- Referensi. *Himpunan Perundang-undangan tentang Ekonomi Islam*. 2012. Jakarta : Referensi
- Srinajani, D. 2012. *Financial Inclusion : Taking Banking Services to the Common Man*. IJMBS Vol 2 Issue 3
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. 2007. Yogyakarta : Ekonisia
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. 2004. Jakarta : Rajawali Press.
- Todaro. *Pembangunan Ekonomi*. 2006. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Wahyuningsih, Sri. 2009. *Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia*. Mediagro. Vol 5 No 1, 2009 Hal 1-14.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- [www.breckland.gov.uk/](http://www.breckland.gov.uk/)
- [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)
- [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)
- [www.iibf.org.in](http://www.iibf.org.in)
- [www.worldbank.com](http://www.worldbank.com)